

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Program Bantuan Sosial Tunai tidak berjalan dengan baik. Hal tersebut terbukti dari jumlah target yang tidak sesuai dengan prosedur di lapangan. Ketidakberhasilan Penyaluran Bantuan Sosial Tunai dapat dibuktikan dari hasil analisis dengan aspek : Akses, Cakupan, Frekuensi, Bias, Ketepatan Layanan, Akuntabilitas, Kesesuaian Program dengan Kebutuhan, sebagai berikut:

1. Akses: terdapat kendala bahwa waktu penyaluran di lapangan tidak berjalan dengan baik dikarenakan pihak Kelurahan memberikan bantuan melebihi waktu yang ditentukan.
2. Cakupan: terdapat kendala bahwa penyaluran bantuan di lapangan tidak berjalan dengan baik, dikarenakan pendataan dari total 419 Kelompok Sasaran hanya 405 Kelompok Sasaran yang mendapat bantuan. Tersisa 14 Kelompok Sasaran belum mendapatkan Bantuan Langsung Tunai ini.
3. Frekuensi: pada aspek ini penyaluran Bantuan Sosial Tunai dilakukan seharusnya sebanyak 3 kali, akan tetapi di lapangan penyaluran ini terjadi sebanyak 2 kali.

4. Bias: pada aspek ini di Kelurahan Gumuruh para masyarakat yang menjadi KPM sudah menerima bantuan ini dan tidak terdapat kelompok sasaran diluar KPM yang mendapat bantuan ini.

5. Ketepatan Layanan: pada aspek ini untuk melihat apakah waktu penyaluran Bantuan Sosial Tunai sudah sesuai dengan jam operasional Kelurahan Gumuruh. Karena masih terdapat KPM yang tiba di Kelurahan Gumuruh jam 10.00 wib tidak mendapatkan bantuan.

6. Akuntabilitas: pada aspek ini melihat bahwa para pegawai di Kelurahan Gumuruh belum menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku, dapat dilihat bahwa masih terdapat KPM yang belum mendapat bantuan ini. Sehingga Bantuan Sosial Tunai ini belum berjalan dengan semestinya.

7. Kesesuaian Program dengan Kebutuhan : aspek ini menjelaskan bahwa para KPM merasa terbantu dengan adanya Bantuan Sosial Tunai ini, tetapi masih banyak KPM yang belum merasa tercukupi dengan adanya Bantuan Sosial Tunai ini karena para KPM masih merasa membutuhkan jenis bantuan yang lain seperti Program Keluarga Harapan, dan Bantuan Pangan Non Tunai saat pandemi COVID 19.

## 6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian Evaluasi Program Bantuan Sosial Tunai pada Masa Pandemi COVID 19 di Kelurahan Gumuruh Kota Bandung peneliti dapat memberikan saran yaitu:

1. Untuk meningkatkan cakupan yang memiliki perbandingan jumlah kelompok sasaran yang sudah mendapatkan bantuan terhadap total kelompok target, Kelurahan Gumuruh dapat berkoordinasi dengan baik antar KPM agar mendapatkan penyaluran bantuan sesuai dilakukan dengan menilai seberapa besar kelompok sasaran yang dapat dijangkau. Pihak Kelurahan Gumuruh perlu menambah sumber daya manusia untuk mencegah terjadinya pendataan penyaluran. Dengan cara dilakukan pendataan yang mutakhir kepada masyarakat miskin, lansia, disabilitas yang sudah menerima bantuan dan yang belum menerima bantuan. Meskipun bantuan saat pandemi, tetapi mekanisme akuntabilitas harus ditegakkan.

2. Untuk meningkatkan akses yang memiliki terjadinya kesamaan kesempatan bagi semua Kelompok Penerima Manfaat, pihak Kelurahan Gumuruh dapat melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada KPM agar penyaluran dapat dilakukan pada waktu yang sudah ditentukan sehingga seluruh KPM mendapatkan bantuan berupa uang tunai ini, mengingat program ini dibentuk karena terjadinya penurunan pendapatan, bahkan kehilangan pekerjaan disaat masa pandemi covid 19.

3. Untuk meningkatkan frekuensi yang memiliki sensitivitas terhadap waktu pada pemberian bantuan, Kelurahan Gumuruh dapat berkoordinasi dengan baik antar agar KPM mendapatkan penyaluran bantuan sesuai dengan prosedur yaitu selama 3 tahap dan menambah sumber daya manusia untuk mencegah terjadinya kesalahan penyaluran.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku :

- Agustino, L. (2012). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Aprillia, H. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu.
- AR, M. (2003). *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: Penerbit LAN.
- Taufiqurokhan. (2014). *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggugjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (pers).
- Drajat, S. (n.d.). *Pengendalian dan Pengawasan Anggaran Daerah dalam Mendukung Terwujudnya Dean Governemeny*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Fadli, M. R. (n.d.). *Memahami desain metode penelitian kualitatif*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.
- Hardani, D. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.
- John, Creswell. (2014). *Research Design Qualitative, Quantitative and Mixed Method Approaches*. California: Sage.
- Koentjaraningrat. (1993). *Metode metode penelitian masyarakat*. Jakarta: Gramdeia.
- Miller & Yang. (2008). *Handbook of Research Methods in Public Administration*. New York: CRC Press.
- Moleong, L. J. (1996). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (1999). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugraharani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books.
- Nugroho, R. (2011). *Public Policy (Dinamika Kebijakan-Analisis)*. Jakarta: PT. Elex Media.

- Purwanto, E. A. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Samodra, W. (1994). *Kebijakan Publik Proses dan Analisis*. Jakarta: Intermedia.
- Semiawan, C. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo.
- Setiawan, A. &. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif* . Sukabumi: CV Jejak.
- Setiawan, A. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Silalahi, U. (2017). *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Silalahi, U. (1999). *Metode dan Metodologi Penelitian*. Bandung: Bina Budhaya.
- Silalahi, U. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Rafika Aditama.
- Singaribuan, M. (n.d.). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Ghalin Indonesia.
- Sobirin, U. B. (2017). *Kebijakan Publik*. Makassar: CV Sah Media.
- Stout, D. L. (1993). *Performance Measurement Guide*.
- Subagyo, J. P. (2004). *Model Penelitian dalam Teori dan Praktek* . Jakarta: Rineka Cipta.
- Subarsono, A. (2008). *Analisis Kebijakan Publik* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiono, D. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiono, D. P. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan* . Bandung: Alfabeta.
- Tanzeh, A. (2011). *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras.
- Wahab, S. A. (2004). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wibowo. 2016. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Rajawali Pers

### **Sumber jurnal :**

- Aprista, Ristyawati.(2020) "*Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI 1945*", Journal Administrative Law & Governance, Vol. 3, No. 2, Juni , hal. 241
- AF, Khofiyya. F., & Nulhaqim, Soni. A (2021). *Analisis Konflik Distribusi Bantuan Sosial COVID-19 dan Strategi Penyelesaian Konflik di Kota Bandung*. Jurnal Kolaborasi Reslusi Konflik, 3(1), 65-74.

Bahtiar, Bahri. (2010). Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. *Jurnal Teknologi Pendidikan*.

Haedar Akib, M. &. (2000). Artikulasi konsep Implementasi Kebijakan : Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya. *Jurnal Kebijakan Publik*, 19

Mustopadidjaja, (2003), Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja, Jakarta: Penerbit LAN

### **Sumber Peraturan Daerah :**

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020

Peraturan Wali Kota Bandung nomor 77 tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 Di Kota Bandung

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020

### **Sumber berita:**

Hendi, Renaldo “Bantuan Pemerintah di Masa Covid-19”,  
(<https://ombudsman.go.id/artikel/bantuan-pemerintah-di-masa-covid-19>),

Humdata (2022) “ COVID – 19 Data Explorer : Global Humanitarian Operations “ ,  
[https://data.humdata.org/visualization/covid19-humanitarian-operations/?ga1&gclid=Cj0KCQjw4PKTBhD8ARIsAHChzRLdE1811JsLBIJGamnQImfbPdFQg-DtbqKWLRzNi8cbclz6pQVhXpYaAp9CEALw\\_wcB](https://data.humdata.org/visualization/covid19-humanitarian-operations/?ga1&gclid=Cj0KCQjw4PKTBhD8ARIsAHChzRLdE1811JsLBIJGamnQImfbPdFQg-DtbqKWLRzNi8cbclz6pQVhXpYaAp9CEALw_wcB)

Kompas.com, “ Deretan Negara Eropa yang Melakukan Lockdown“  
<https://www.kompas.com/tren/read/2020/11/01/150300165/deretan-negara-di-eropa-yang-kembali-lakukan-lockdown?page=all>

### **Sumber lain:**

BPS (2022) “ Angka Pengangguran di Indonesia tahun 2022 “ ,  
<https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/05/09/1915/tahub-2022--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-83-persen.html>

Dinas Sosial Kota Bandung

[https:// dinassosialkotabandung.com/rekap penyaluran bansos ppkm darurat](https://dinassosialkotabandung.com/rekap-penyaluran-bansos-ppkm-darurat)

Bandung, B. P. (2018). *Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Bandung, 2014-2018*. Diambil kembali dari <https://bandungkota.bps.go.id/>:  
<https://bandungkota.bps.go.id/statictable/2020/07/06/687/jumlah-dan-laju-pertumbuhan-penduduk-di-kota-bandung-2014-2018.html>